

Sosialisasi Komunikasi Politik Dan Pendidikan Politik Untuk Pemilu Damai 2024 Bagi Masyarakat Di Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan

¹⁾Johnson, ²⁾Pasaribu Laurencia P. Degodona, ³⁾Artha L Tobing, ⁴⁾Rifka Hutasoit, ⁵⁾Theresia Gulo, ⁶⁾Ridhon M B Simangunsong, ⁷⁾Lasma Siagian

^{1,2,3)}Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
^{4,5)}Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
⁶⁾Dosen tetap Administrasi bisnis Fisip, Universitas HKBP Nommensen
⁷⁾Dosen tetap Prodi Ekonomi Pendidikan FKIP, Universitas HKBP Nommensen
Email: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Komunikasi politik,
Pemilu 2024

Komunikasi politik dan pendidikan politik yang membangun tentu sangat kita butuhkan agar tercipta, bahkan ini bisa menjadi sebuah gerakan yang menimbulkan stimulus yang sangat baik dalam mensukseskan pemilu 2024. Cita-cita dan harapan kita bersama adalah pemilu 2024 ini bisa menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan harapan, out put dan out come nya sangat bagus. Melalui out come dan out put yang sangat bagus ini akan lahir pemimpin yang sangat amanah, visioner, taat hukum, dan berjiwa pelayanan yang pada akhirnya akan bisa mendorong dan mewujudkan tujuan negara yang sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk itu, komunikasi politik yang sangat baik penting diciptakan oleh semua stakeholder, mulai dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, partai politik sebagai lembaga yang mencalonkan caleg, dan juga para calon legislatif sebagai partisan langsung untuk merebut kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten dan Kota. Untuk itu, komunikasi politik yang bagus dan membangun harus sesegera mungkin dilakukan mulai dari masyarakat desa, atau kelurahan yang sangat kita harapkan memberikan suaranya di bilik pemilu pada tahun 2024 ini. Inilah yang dilakukan oleh team pengabdian masyarakat FISIPOL UHN Medan pada masyarakat Jalan Sekata di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk mendorong komunikasi politik yang bagus dan baik.

ABSTRACT

Keywords:
Political communication,
2024 Election

We really need constructive political communication and political education to create it, in fact this could be a movement that creates a very good stimulus in making the 2024 election a success. Our common goal and hope is that the 2024 election can be a means of upholding sovereignty. people hope that the output and outcome will be very good. Through these excellent outcomes and outputs, leaders who are very trustworthy, visionary, law-abiding and servant-minded will be born who will ultimately be able to encourage and realize the state's goals as stated in the 1945 Constitution. For this reason, political communication is very important. important benefits are created by all stakeholders, starting from the KPU as the election organizing institution, Bawaslu as the supervisor, political parties as institutions that nominate legislative candidates, and also legislative candidates as direct partisans to win seats in the DPR RI, Provincial DPRD, and also Regency and City DPRD . For this reason, good and constructive political communication must be carried out as soon as possible starting from village communities, or sub-districts who we really hope to vote in the election booth in 2024. This is what the FISIPOL UHN Medan community service team did in the Jalan Sekata community in Sei Agul Village, West Medan District, Medan City to encourage good and good political communication.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pemilu tahun 2024 adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Harapan kita semua sama, prosesnya berjalan dengan baik dan penuh dengan kejujuran. Melalui pemilu ini kita akan memilih para wakil rakyat, presiden dan Wapres lima tahun kedepan yang akan jadi pengelola negara. Harapan kita, hanya dengan pemilu yang jujur dan damailah bisa lahir pemimpin yang merakyat dan tahu mengelola negara dengan baik.

Apa upaya yang dilakukan agar pemilu damai dan jujur berbasis masyarakat bisa terwujud dengan baik? Tentu kita butuh komunikasi yang baik dan bagus agar partisipasi masyarakat bisa terwujud dengan baik. Tentu ini merupakan out put dari pemilu sebagai pintu masuk. Maka pemilu yang berkualitas dan juga pemilu serentak yang terus jadi wacana adalah upaya melahirkan pemimpin berkualitas yang mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas di daerah pula.



Gambar 1. Foto Kegiatan

Berbagai upaya, termasuk dengan melakukan revisi UU Pemilu merupakan upaya untuk mendorong pemilu yang lebih baik dengan tujuan demokratisasi lokal punya payung hukum (legal protection) yang jelas dan mampu menjadi dasar hukum yang kuat untuk menciptakan iklim politik yang sehat (a healthy political climate) dan pelembagaan politik sehat (political institutionalization healthy) di tingkat lokal. Untuk itu, revisi UU Pemilu harus fokus pada upaya penciptaan sistem rekrutmen yang benar, mencegah politik uang, dan membuat pilkada lebih demokratis (*more democratic*).

Untuk itulah Revisi UU Pemilu harus mampu membuat sebuah paradigma (*a paradigm*) dengan satu kalimat kunci, yakni “Kebenaran esensi Pemilu Serentak”. Tentu yang jadi pokok utama permasalahan (*the main subjek matter*) adalah, apakah keputusan para petinggi parpol dalam membuat keputusannya mengenai para calon kepala daerah di pemilu serentak selama ini telah sesuai dengan kebenaran esensi (the essence of truth) sebagai upaya membuat kehidupan lebih baik dalam dunia politik kita?

Sekali lagi, para pakar etika selalu menekankan (*emphasize*) dan menegaskan (*affirm*), “ketika pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa mengedepankan penalaran pragmatis (forward the pragmatic reasoning) dalam membangun kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga, masyarakat ataupun bangsa, inilah penyebab mengapa kehidupan semakin merisaukan. Penalaran pragmatis boleh menghasilkan kehidupan penuh keceriaan, namun minus kedamaian. Jadi akar masalah dalam kehidupan politik kita adalah kebenaran pragmatis dari para petinggi parpol dalam mencalonkan para calon kepala daerah. Andaikan kebenaran esensi politik yang jadi rujukan para petinggi parpol dalam pemilu, maka “out put” dan “out come” yang akan dihasilkan oleh pemilu serentak akan berbuah terciptanya kepemimpinan lokal yang luar biasa (*outstanding local leadership*), arif dan mampu mengayomi apa yang jadi aspirasi masyarakat lokal.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penyuluhan atau pendidikan politik di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kentara adalah agar terpilih kepala desa yang cerdas, jauh dari KKN, bermutu sehingga konsep pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan mampu memimpj desa dengan baik. Mengingat selama ini aroma KKN, mahar politik, sewa perahu, uang pelicin, dan pertemuan dalam ruang gelap merupakan penyakit politik yang sangat laten (*political hihgly latent disease*) yang musti harus diamputasi karena inilah

yang jadi sumber masalah di negara ini. Saat ini masa depan pemilu serentak sedang dipertaruhkan. Ada isu yang membuat publik khawatir pemilu serentak ini jadi atau tidak. Penundaan pemilu serentak terus menimbulkan kecemasan (*cause anxiety*). Kecemasan ini berangkat dari ketidaksiapan para elite politik. Elite politik banyak yang khawatir karena kepentingannya yang terganggu, pada akhirnya pertarungan pemilu adalah pertarungan kepentingan elite, bukan pertarungan kepentingan rakyat.



Gambar 2. Foto Bersama

Kalau pemilu dijadikan sebagai pertarungan kepentingan elite politik, semakin nyata bahwa kebenaran esensi pemilu serentak kembali menjadi sesuatu yang musti dipertaruhkan. Mendorong kebenaran esensi pemilu serentak butuh dukungan penuh dari rakyat, kejujuran parpol, kejujuran para calon, dan penegakan hukum yang tegas. Hukum yang tegas, aturan main pemilu dan kejujuran para calon tentu jadi modal yang sangat penting untuk mewujudkan demokratisasi di daerah.

Untuk itu, memahami hakikat pemilu merupakan langkah awal yang harus kita renungkan bersama. Tujuan pemilu tentu untuk memilih pemimpin di daerah yang bisa mengelola daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Perwujudan langsung nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, tugas kepemimpinan di daerah adalah mempersiapkan masa depan masyarakat daerah dengan sentuhan kepemimpinan daerah yang punya visi, misi, dan tanggung jawab penuh terhadap masa depan daerah yang lebih baik. Kepala daerah harus mampu membentuk pemerintahan daerah yang bersih (*local leader who are clean*), pemimpin daerah harus melakukan berbagai terobosan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*).



Gambar 1. Foto Bersama

Masalahnya, dari manakah lahir kepemimpinan yang aspiratif, visioner, jujur, berintegritas? Secara sistem lahir dari rahim pemilu sebagai persalinan politik. Untuk itu, kembali kepada kebenaran esensi pemilu serentak merupakan sebuah upaya yang menyeluruh membangun kepemimpinan yang kuat di daerah. Untuk itu, sebuah pemahaman yang lahir dari kebulatan tekad kolektif sangat kita butuhkan. Kebenaran esensi politik pemilu serentak wujudnya adalah:

Pertama, rakyat sebagai pemilik kedaulatan haruslah rakyat yang cerdas (*intelligent people*), kritis, peduli kepada pemilu. Untuk itu, rakyat saatnya memilih pemimpin dengan kesadaran bersama bahwa pemilu akan jadi momentum untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berkapasitas. Untuk itu,

segala bujukan, rayuan untuk memilih calon A, B, C misalnya dengan pertimbangan subjektif seperti ikatan emosional, money poilitic, sentimen keagamaan, atau unsur SARA musti ditolak. Siapapun yang jadi calon asalkan melakukan politik yang sehat, bermartabat, dan motivasi yang baik dan benar harus kita dahulukan. Dalam hal inilah, rakyat diharapkan cerdas, pintar, untuk memilih. Dengan demikian, rakyat sebagai penentu pemilu serentak karena rakyatlah yang menentukan siapa yang jadi pemenang harus menonjolkan sikap kritisnya dan kepeduliannya pada pemilu serentak ini.

Kedua, semua calon legislatif dan capres dan cawapres musti berkata jujur kepada rakyat atas dasar apa rakyat mencalonkan kepala daerah yang didukungnya. Pertimbangan kualitas yang terukur, transparan sangat dibutuhkan oleh rakyat karena inilah bentuk pendidikan politik (political education) yang sesungguhnya. Parpol bertujuan memberikan pendidikan politik yang baik dan benar. Wujud pendidikan politik yang paling sederhana adalah, parpol mau terbuka kepada rakyat mengapa keputusan itu yang diambil oleh parpol. Misalnya, seorang calon mencalonkan si X, maka latar belakangnya, mengapa itu dicalonkan haruslah dipahami oleh rakyat. Dengan demikian, parpol sejalan dan sehati dengan rakyat bisa terlihat. Selama ini banyak calon kepala daerah yang dipaksakan oleh parpol dan masyarakat tidak paham logika yang dibangun oleh partai politik. Untuk itu, perlu sebuah upaya dalam bentuk harmoni apa yang diputuskan oleh parpol mendapat dukungan dari rakyat, dengan demikian keputusan parpol itu merupakan keputusan yang juga dikehendaki oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Ketiga, aturan main dalam pemilu harus ditegakkan (the rules are enforced). Semua aturan main baik dari BPD atau Pemerintah Kabupaten, pemerintah tentu bertujuan sama, menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya apa yang jadi tujuan negara di tingkat lokal. Untuk itu, aturan main pemilu harus tegak dan tidak mengenal kompromi pada kekuatan politik apapun. Dengan demikian, tertib politik akan muncul pada pemilu yang muaranya jelas, terpilihnya pemimpin daerah yang bagus.

Adapun materi pendidikan politik yang diberikan kepada warga Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan

1. Memilih dengan cerdas dan tepat siapa saja calon legilsatif DPR RI, Privinsi dan Kabupaten/Kota
2. Memilih dengan cerdas siapa saja calon Presiden dan Cawapres yang punya visi dan misi yang cukup bagus dan signifikan.
3. Mencegah money politic dalam pemilu
4. Mencegah SARA atau terjadinya politisasi marga dalam pemilu agar kultur yang baik tetap terjaga
5. Mendorong semua warga untuk mmebangun budaya politik siap kalah dan menang agar tetap terbangun harmoni sosial.

III. KESIMPULAN

Kebenaran esensi pemilu tahun 2024 pada konteks pendidikan politik sangatlah penting. Kehidupan politik akan lebih baik di Desa jika kita sepakat mengenai kebenaran esensi politik. Masalahnya, apakah kebenaran esensi politik itu bisa kita wujudkan ditengah paradigma baru UU Tentang Pemilu dan Kepemiluan sebagai upaya menghasilkan calon DPR dan Presiden/ Wapres yang berkualitas di pemerinatah yang bisa mendorong pembangunan Dbangsa ke arah yang lebih baik dengan berbagai indikator yang jelas. Hakikat dan esensi dari pemilu serentak adalah efisiensi politik, mencegah money politics, dan mendorong kebersamaan politik (political togetherness) masyarakat lokal sehingga peradaban politik daerah benar-benar lahir dan tumbuh dengan baik kedepan. Inilah yang kita harapkan di Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagai kekuatan menghadapi pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon W. 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darise, Nurlan. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: PT.Indeks
- David, Fred R. 2009, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat